

**PENGARUH KOMPETENSI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH, SIKD DAN KUALITAS SDM TERHADAP
NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA DUMAI**

**Oleh :
Tengku Dea Monica
Pembimbing : Taufeni Taufik dan Al Azhar L**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : tdeamonica@gmail.com*

*Effect of Financial Administration Official Competence, System of Internal Control,
Control of Finance, Information System of Regional and Human Resources
on Quality Reporting Information Value Of Local Government
Finance (Studies In Working Unit Dumai City Area)*

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect of the competence of the financial administration officials, the internal control system, the local finance supervision, regional financial information system and the quality of human resources to the value of the local government financial reporting information in Dumai. The technique used is purposive sampling. Respondents in this study is the Sub Division of Finance and Financial Staff. The sample used in this study were 66 respondents. Statistical methods are used to test hypothesis of the research is the analysis of multiple linier regression using the software spss version 22.0. The result of this study indicate that the variable are Financial Administration Official Competence affect the value of the local government financial reporting information with a regression coefficient of 0.154 and 0.024 significant ($\alpha < 0.05$), internal control system of government influence on the value of the local government financial reporting information with a regression coefficient of 0.317 and 0.004 significant ($\alpha < 0.05$), the area of financial supervision affect the value of the local government financial reporting information with a regression coefficient of 0.599 and 0.001 significant ($\alpha < 0.05$), financial information systems area affect the value of government financial reporting information area with a regression coefficient of 0.221 and 0.046 significant ($\alpha < 0.05$), quality of human resources affect the value of the local government financial reporting information with a regression coefficient of 0.272 and 0.035 significant ($\alpha < 0.05$). The result of the coefficient of determination (R^2) of 0.680 means that the contribution of independent variable influence to variable by 68% and the remaining 32% are influenced by other variables.

Keywords: Information, financial administration, system of internal control, control of regional finance and quality of human resource

PENDAHULUAN

Pada pemerintahan pusat ataupun daerah sebagai salah satu

bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Nilai informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut berhubungan dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi.

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010), informasi akuntansi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, antara lain; Relevan, Andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Informasi yang terkandung didalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan.

Dilihat dari manfaat pelaksanaan laporan keuangan suatu pemerintah daerah, pada pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai 2014 ternyata belum ada perkembangan dari tahun 2013 lalu. Bukti nyata hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014.

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan

keuangan, yaitu: (1) Penatausahaan kas Pemerintah Kota Dumai kurang memadai; (2) Aset Lainnya – Aset Lain-lain tidak diyakini kewajarannya; (3) Kesalahan penganggaran pada empat SKPD; (4) Penatausahaan dan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Dumai belum memadai; dan (5) Penyertaan modal Pemerintah Kota Dumai pada PDAM Tirta Dumai Bersemai dan PT Pembangunan Dumai tidak sesuai ketentuan.

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu: (1) Pelaksanaan paket pekerjaan revitalisasi ruang kelas SDN Wilayah *Labour Housing* 10 kelas bertingkat tidak sesuai kontrak dan terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan; (2) Terdapat penggunaan atas penerimaan retribusi Terminal Barang; dan (3) Jaminan Pelaksanaan tidak melindungi periode Perjanjian Kerjasama dan dicairkan oleh Penyedia Barang/Jasa. (<http://pekanbaru.bpk.go.id/p=19622>)

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional No. 46A Tahun 2003 Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi sangat dibutuhkan bagi seorang tenaga kerja terutama pada pejabat penatausahaan keuangan pemerintah. Apabila pejabat penatausahaan akuntansi tidak memiliki kompetensi yang baik

mengenai akuntansi, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, yaitu berdampak pada keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan.

Pengendalian intern menurut PP No. 60 Tahun 2008 merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai pelaksana wewenang harus memprioritaskan untuk meningkatkan pengendalian intern agar peluang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang atau kecurangan-kecurangan lainnya semakin sempit. Karena sesuai masalah yang diungkapkan oleh BPK bahwa kerugian Negara pada tahun 2014 paling banyak disebabkan kasus kelemahan pada sistem pengendalian intern. Ketika sistem pengendalian intern lemah dan tidak berfungsi lagi, keuangan pemerintah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran serta terjadi tindakan penyelewengan yang dapat merugikan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan serta pemborosan dapat segera diperbaiki dan diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan perlu adanya pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar terhindar dari tindakan penyelewengan dan kecurangan seperti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menurut PP No.65 Tahun 2010 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemerintah Daerah pada saat ini telah dituntut untuk bisa menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban yang memiliki nilai akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Sudah diperkenalkan sistem baru dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (SIKD). SIKD adalah sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan daerah.

Proses penyusunan APBD yang membutuhkan waktu lama, dengan tumpukan dokumen yang memenuhi tempat, kini dengan SIKD, waktu penyusunan menjadi lebih singkat dan tidak perlu

menumpuk dokumen begitu banyak, karena dibantu oleh otomatisasi dan sistem digital.

Kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang unggul, sadar akan identitasnya, serta sadar akan wawasan nusantara. (A.R., Tilaar, 1999:199). Untuk menilai kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi termasuk nilai informasi. Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatan-waktu.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Apakah kompetensi pejabat penatausahaan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah? 2) Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah? 3) Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah? 4) Apakah sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah? 5) Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menguji dan menganalisa pengaruh kompetensi

pejabat penatausahaan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. 2) Untuk meneliti dan menganalisa pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. 3) Untuk menilainya dan menganalisa pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. 4) Untuk menguji dan menganalisa pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. 5) Untuk menguji dan menganalisa pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Laporan keuangan daerah adalah Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mengenai fungsi Laporan Keuangan Daerah adalah gambaran tentang kondisi keuangan pemerintah daerah secara nyata.

Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 71 tahun 2010, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan

umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubungan pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) :

- Relevan,
- Dapat dibandingkan,
- Dapat dipahami

Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan

Menurut keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 (Yuliarta, 2013) bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Hutapea P dan Thoha N (2008:42) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi, yaitu : 1) Pengetahuan (*Knowledge*), 2) Keterampilan (*Skill*), 3) Sikap dan Perilaku (*Attitude*).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian merupakan *internal control* yang berada

dibawah kendali eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin bahwa strategi dijalankan secara baik, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai (Mardiasmo, 2002:208).

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam nilai informasi laporan keuangan Pemerintah yang meliputi: a) Lingkungan pengendalian, b) Penilaian risiko, c) Kegiatan pengendalian, d) Informasi dan Komunikasi, e) Pemantauan pengendalian.

Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengawasan Keuangan Daerah yaitu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dengan kebijakan umum APBD.

Unsur-unsur pengawasan keuangan daerah yaitu; 1) Perencanaan Dan penganggaran, 2) Pelaksanaan dan penatausahaan, 3) Pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sistem Informasi Keuangan Daerah

Definisi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah menurut PP No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. "Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada

masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah". Menurut PP No.65 Tahun 2010 Indikator SIKD sebagai berikut; prosedur, pengkodean, peralatan aplikasi dan jaringan komunikasi data.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut A.R., Tilaar (1999:199) Kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang unggul, sadar akan identitasnya, serta sadar akan wawasan nusantara.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, Ukuran kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional No. 46A Tahun 2003 Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Dalam penelitian Yuliarta (2013) menunjukkan hasil penelitian, bahwa kompetensi pejabat penatausahaan berpengaruh

positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pengertian serta fenomena yang ada bahwa kompetensi sangat dibutuhkan bagi seorang tenaga kerja terutama pada pejabat penatausahaan keuangan pemerintah. Apabila pejabat penatausahaan akuntansi tidak memiliki kompetensi yang baik mengenai akuntansi, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, yaitu berdampak pada keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan.

Maka dari rincian tersebut dapat diindikasikan bahwa semakin baik kompetensi pejabat penatausahaan yang dilakukan oleh SKPD, maka akan semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H₁: Kompetensi Pejabat Penatausahaan berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian intern menurut PP No. 60 Tahun 2008 merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan

keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anita Indrawati (2012), dengan judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah yg membuktikan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari penelitian tersebut, maka pemerintah sebagai pelaksana wewenang harus memprioritaskan untuk meningkatkan pengendalian intern agar peluang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang atau kecurangan-kecurangan lainnya semakin sempit. Karena sesuai masalah yang diungkapkan oleh BPK bahwa kerugian Negara pada tahun 2014 paling banyak disebabkan kasus kelemahan pada sistem pengendalian intern. Ketika sistem pengendalian intern lemah dan tidak berfungsi lagi, keuangan pemerintah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran serta terjadi tindakan penyelewengan yang dapat merugikan.

Sehingga dalam hal ini, diperlukan pengendalian intern yang baik karena akan berpengaruh terhadap pengelolaan laporan keuangan. Apabila semakin baik sistem pengendalian intern maka akan semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan yang dihasilkan serta nilai informasi laporan keuangan dapat dipercaya dan meningkatkan keyakinan para pemakai dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H₂: Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anita Indrawati (2012) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan yang membuktikan bahwa pengawasan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan serta pemborosan dapat segera diperbaiki dan diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan perlu adanya pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar terhindar dari tindakan penyelewengan dan kecurangan seperti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dari penjelasan tersebut dapat diindikasikan bahwa pengawasan keuangan memiliki pengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan karena jika pengawasan dilakukan secara terus-menerus,

maka pengelolaan keuangan akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja yang baik dan akan terlihat pada nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H₃: Pengawasan Keuangan Pemerintah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP No.65 Tahun 2010 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah pada saat ini telah dituntut untuk bisa menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban yang memiliki nilai akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Proses penyusunan APBD yang membutuhkan waktu lama, dengan tumpukan dokumen yang memenuhi tempat, kini dengan SIKD, waktu penyusunan menjadi lebih singkat dan tidak perlu menumpuk dokumen begitu banyak, karena dibantu oleh otomatisasi dan sistem digital.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan antara sistem informasi keuangan daerah dengan nilai informasi pelaporan keuangan daerah, semakin baik SIKD dikelola maka semakin baik pula Nilai informasi yang dihasilkan. sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H₄: Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang unggul, sadar akan identitasnya, serta sadar akan wawasan nusantara. (A.R., Tilaar, 1999:199).

Untuk menilai kapasitas kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi termasuk nilai informasi, kompetensi sumberdaya tersebut. Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatan-waktuan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2010), menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan kondisi sub bagian akuntansi/tata usaha

keuangan yang sudah mendukung dan juga diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat hubungan antara kualitas sumber daya manusia dengan nilai informasi pelaporan keuangan daerah, semakin baik kualitas sumber daya manusia maka semakin baik pula nilai informasi yang dihasilkan. sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H5: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 33 SKPD Kota Dumai. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah sub bagian keuangan dan staff keuangan pada masing-masing SKPD di Kota Dumai, sehingga sampel yang diambil untuk penelitian ini berjumlah 66 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, yang merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yaitu dengan menggunakan kuesioner. Data tersebut berasal dari jawaban koresponden atas kuesioner yang dibagikan kepada responden yakni sekretaris, kasubag umum dan

bendahara di tiap SKPD Kota Dumai.

Metode Analisis

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan table distribusi frekuensi yang menunjukkan kisaran teoritis, kisaran actual, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (Ghozali, 2013:19).

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau keahlian suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya (Sugiyono, 2010). Kriteria pengujian validitas adalah (Ghozali, 2013:53): Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel maka butir pertanyaan tersebut valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar suatu pengukuran mengukur dengan stabil atau konsisten. Instrumen dipercaya apabila jawaban dari responden atas pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan cronbach alpha (α), jika nilai cronbach alpha $>$ 0,70 maka instrumen dikatakan reliabel (Ghozali, 2013:48).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat atau variabel

bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model Regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat normal *probability plot*. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang akan menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.(Ghozali,2013).

Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen satu dengan variabel independen lain. Uji multikolinearitas dibuktikan dengan nilai *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Jika hasil pengujian menyatakan bahwa nilai VIF dan *tolerance* pada masing-masing variabel independen menunjukkan angka lebih kecil dari 10 dan lebih besar dari 0,10 (Ghozali, 2013:91). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi linear penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat Heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel (ZPRED) dengan nilai residualnya (SREID). Model regresi yang baik jika *variance* dari residual satu ke pengamatan lain tetap, sehingga diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:105).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. (Ghozali, 2013). Bila nilai D-W terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y	=	Nilai Informasi Pelaporan Keuangan
A	=	Konstanta
b ₁ , b ₂	=	Koefisien Regresi
X ₁	=	Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan
X ₂	=	Sistem Pengendalian Intern
X ₃	=	Pengawasan Keuangan
X ₄	=	Sistem Informasi Keuangan Daerah
X ₅	=	Kualitas Sumber Daya Manusia
E	=	Standar Error

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependennya. Jika nilai t hitung > t tabel maka hipotesis diterima, artinya variabel independen

berpengaruh terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinansi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya (Ghozali, 2013:169).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data, objek yang digunakan adalah 33 SKPD di Kota Dumai. Dengan 99 kuesioner yang dikirim dan kembali 90.

Hasil Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai deskripsi variabel penelitian yang disajikan dalam *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi.

Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian statistik, diketahui bahwa variabel Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki total skor jawaban responden sebesar 3121 dengan nilai minimal sebesar 792, nilai maksimal 3960, rata-rata skor sebesar 3.94 dan standar deviasi sebesar 3.95. Kriteria posisi jawaban responden terhadap variabel senjangan anggaran menunjukkan kriteria cukup, karena berada pada *range* 68%-84% yaitu 78,81%.

Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian statistik, diketahui bahwa variabel Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah memiliki total skor jawaban responden sebesar 4586 dengan nilai minimal sebesar 1122, nilai maksimal 5610, rata-rata skor sebesar 4.09 dan standar deviasi sebesar 6.83. Kriteria posisi jawaban responden terhadap variabel senjangan anggaran menunjukkan kriteria cukup, karena berada pada *range* 68%-84% yaitu 81,75%.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Hasil pengujian statistik, diketahui bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki total skor jawaban responden sebesar 4393 dengan nilai minimal sebesar 1056, nilai maksimal 5280, rata-rata skor sebesar 4.16 dan standar deviasi sebesar 5.81. Kriteria posisi jawaban responden terhadap variabel senjangan anggaran menunjukkan kriteria cukup, karena berada pada *range* 68%-84% yaitu 83,20%.

Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil pengujian statistik, diketahui bahwa variabel Pengawasan Keuangan Daerah memiliki total skor jawaban responden sebesar 1511 dengan nilai minimal sebesar 396, nilai maksimal 1980, rata-rata skor sebesar 3.82 dan standar deviasi sebesar 2.95. Kriteria posisi jawaban responden terhadap variabel senjangan anggaran menunjukkan kriteria cukup, karena berada pada *range* 68%-84% yaitu 76,31%.

Sistem Informasi Keungan Daerah

Hasil pengujian statistik, diketahui bahwa variabel Sistem Informasi Keungan Daerah memiliki total skor jawaban responden sebesar 2408 dengan nilai minimal sebesar 594, nilai maksimal 2970, rata-rata skor sebesar 4.05 dan standar deviasi sebesar 4.87. Kriteria posisi jawaban responden terhadap variabel senjangan anggaran menunjukkan kriteria cukup, karena berada pada *range* 68%-84% yaitu 81.80%.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Hasil pengujian statistik, diketahui bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki total skor jawaban responden sebesar 1865 dengan nilai minimal sebesar 462, nilai maksimal 2310, rata-rata skor sebesar 4.04 dan standar deviasi sebesar 3.65. Kriteria posisi jawaban responden terhadap variabel senjangan anggaran menunjukkan kriteria cukup, karena berada pada *range* 68%-84% yaitu 80.74%.

Hasil Uji Validitas

Nilai *r* tabel dalam penelitian ini diperoleh dengan persamaan $N - 2 = 66 - 2 = 64 = 0,242$. Dan berdasarkan pengujian yang dilakukan diperoleh nilai *r* hitung seluruh pernyataan $> r$ tabel, artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Dari hasil pengujian diketahui nilai reliabilitas seluruh variabel $\geq 0,6$. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau dapat dipercaya.

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan pengujian yang dilakukan diketahui bahwa titik-titik menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa data penelitian berdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Dari hasil pengujian diketahui nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 dan *tolerance* $> 0,10$. Maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari pengujian yang dilakukan diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala heterokedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Dari pengujian yang dilakukan diperoleh nilai *Durbin Watson* terletak antara -2 dan $+2 = -2 < 1,651 < +2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NIPKPD} = & -12,701 + 0,154 \text{ KPPK} \\ & + 0,317 \text{ SPIP} + 0,599 \\ & \text{PKD} + 0,221 \text{ SIKD} + \\ & 0,272 \text{ KSDM} + e \end{aligned}$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 sebesar 0,680. Artinya adalah bahwa persentase pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, pengawasan keuangan daerah, sistem informasi keuangan daerah dan kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai sebesar 68 %.

Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel} = 2.312 > 2.000$ dengan nilai Sig. (0.024) < 0.05 . Maka hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliarta (2013) yang menemukan bahwa kompetensi pejabat penatausahaan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel} = 3.018 > 2.000$ dengan nilai Sig. (0.004) < 0.05 . Maka hasil penelitian

ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita Arfianti (2011) yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel} = 3.674 > 2.000$ dengan nilai Sig. (0.001) < 0.05 . Maka hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anita Indrawati (2012) yang membuktikan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel} = 2.038 > 2.000$ dengan nilai Sig. (0.046) < 0.05 . Maka hasil penelitian

ini menerima hipotesis keempat yang menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) yang membuktikan bahwa pemanfaatan TI berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel} = 2.159 > 2.000$ dengan nilai Sig. (0.035) < 0.05. Maka hasil penelitian ini menerima hipotesis kelima yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian maka hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anita Indrawati (2012) yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai.
2. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai.
3. Pengawasan keuangan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai.
4. Sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai.
5. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai.

Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hasil ini dapat menjadi acuan bagi SKPD dalam rangka meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai.
2. Kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode wawancara serta angket terbuka dalam penelitian, agar data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Disamping itu juga perlu menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Arfianti, Dita. (2011). *Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Di Kabupaten Batang)*. Jurnal Penelitian Akuntansi
- A.R Tilaar. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*. Magelang. Tera Indonesia.
- Hasibuan, Melayu S.P., 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- <http://pekanbaru.bpk.go.id/?p=19622>
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indrawati, Dwi Anita. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Penelitian
- Indriasari, Desi . 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah*. Jurnal Penelitian Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang
- Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Yuliarta :2013. *Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang)*. Jurnal Penelitian Universitas Negeri Padang.
- Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah